



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ini dengan baik. Rencana Kerja ini disusun sebagai landasan perencanaan program dan kegiatan DISKOMINFO tahun 2025, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Pelaksanaan dan penyusunan Rencana Kerja ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tentu saja masih ada kekurangan atas hasil penyusunan Rencana Kerja ini, namun dalam penyusunannya secara proses telah mengikuti mekanisme dan tata cara yang telah ditentukan, sehingga harapannya telah mengakomodir kebutuhan program dan kegiatan guna mencapai sasaran Diskominfo.

Tidak lupa ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penyusunan Dokumen ini, sehingga mudah-mudahan Dokumen Renja ini bisa menjadi pedoman baku seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

Penajam, Juli 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika



Khairudin, S.S., M.M.
NIP. 197302112009121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023.....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Diskominfo.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika	43
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	54
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian.....	59
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	59
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d Tahun 2024 Kabupaten Penajam Paser Utara	15
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara.....	25
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.....	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.....	45
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah proses perencanaan tahunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Renja Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat penting karena ia menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penentuan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut. Proses ini melibatkan berbagai tahap yang harus mengikuti prosedur dan prinsip perencanaan yang jelas dan terstruktur agar dapat menghasilkan dokumen yang berkualitas dan tepat sasaran.

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bertujuan untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam bidang komunikasi, informasi, dan teknologi. Renja ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam merespon dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta tantangan komunikasi yang semakin kompleks di era digital. Penyusunan Renja Diskominfo dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting yang mencakup kebutuhan untuk mengoptimalkan layanan publik, memperkuat sistem komunikasi dan informasi daerah, serta mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Digital dan Transformasi Teknologi

Salah satu latar belakang utama penyusunan Renja Diskominfo adalah perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan transformasi digital dalam memberikan layanan publik. Dalam rangka menyongsong Revolusi Industri 4.0 dan Era Digital, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa Diskominfo memiliki rencana yang jelas dan terukur untuk mengembangkan infrastruktur teknologi, memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Renja Diskominfo diharapkan dapat menyelaraskan berbagai program dengan kebijakan nasional tentang e-Government, smart city, dan transformasi digital, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, memudahkan akses layanan publik, dan mempercepat proses pembangunan daerah melalui pemanfaatan teknologi.

b. Meningkatkan Layanan Publik melalui Teknologi dan Media Komunikasi

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Diskominfo memiliki peran penting dalam menyediakan layanan informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses oleh publik. Penyusunan Renja bertujuan untuk merumuskan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi, seperti pengembangan Sistem Informasi Daerah, Portal Layanan Publik, dan e-Procurement. Selain itu, media komunikasi seperti website pemerintah, aplikasi mobile, dan media sosial menjadi sarana penting untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Renja Diskominfo perlu mengakomodasi program-program yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang relevan, seperti informasi terkait kebijakan pemerintah, pengumuman kegiatan pemerintah daerah, serta layanan kesehatan,

pendidikan, dan pembangunan.

c. Mendukung Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik

Penyusunan Renja juga dilatarbelakangi oleh pentingnya keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan good governance. Dalam konteks ini, Diskominfo memiliki peran sentral dalam mengelola informasi publik dan memastikan masyarakat mendapatkan akses yang mudah terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Penyusunan Renja harus mencakup upaya untuk memperkuat Sistem Informasi Publik dan Portal Transparansi Anggaran, serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparatur pemerintah dalam pengelolaan informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Renja ini juga harus mencakup program yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan melalui saluran-saluran digital, seperti forum diskusi online, e-participation platforms, serta aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital.

d. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Daerah

Ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK yang memadai merupakan prasyarat utama dalam menjalankan program-program berbasis teknologi. Penyusunan Renja Diskominfo perlu mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan konektivitas internet di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam hal akses internet. Pembangunan jaringan internet berbasis fiber optic atau satelit di wilayah-wilayah terpencil, serta peningkatan kualitas layanan data center dan cloud computing, menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah berbasis digital.

Selain itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang TIK juga harus menjadi prioritas. Hal ini mencakup pelatihan dan

pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di bidang teknologi informasi dan komunikasi, agar mereka mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

e. Evaluasi Program dan Pencapaian Tahun Sebelumnya

Penyusunan Renja Diskominfo juga didasari oleh evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program-program yang telah dijalankan. Program yang belum mencapai target atau belum memberikan dampak yang diinginkan perlu diperbaiki atau disempurnakan. Selain itu, program-program baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi juga perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Renja 2025.

f. Menghadapi Tantangan Keamanan Informasi dan Privasi

Keamanan informasi menjadi salah satu tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan diproses oleh pemerintah, baik itu terkait dengan identitas masyarakat, pelayanan publik, maupun transaksi elektronik, perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan siber menjadi isu yang sangat penting. Oleh karena itu, penyusunan Renja Diskominfo 2025 harus mencakup penguatan kebijakan dan sistem keamanan siber, serta pelaksanaan audit keamanan secara rutin untuk melindungi data dan informasi yang ada.

g. Mendukung Pembangunan Smart City

Sebagai bagian dari upaya menuju smart city, Diskominfo harus merencanakan pengembangan dan implementasi sistem berbasis teknologi yang mendukung kemajuan kota cerdas, seperti sistem transportasi pintar, pengelolaan sampah berbasis digital, pengawasan keamanan melalui teknologi, dan penggunaan data

untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Penyusunan Renja perlu mencakup berbagai program yang mendukung percepatan pembangunan smart city di daerah, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing daerah.

Penyusunan Renja Diskominfo bertujuan untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, serta merespons tantangan dan peluang yang dihadapi dalam bidang komunikasi, informasi, dan teknologi. Renja ini harus mencakup upaya untuk memperkuat infrastruktur TIK, meningkatkan layanan publik berbasis digital, memastikan keterbukaan informasi dan partisipasi publik, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi. Dengan demikian, Diskominfo dapat memainkan peran sentral dalam mendorong kemajuan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih efektif dan efisien.

- Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah biasanya melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur, yaitu:
 1. Pengumpulan Data dan Informasi: Mengidentifikasi kebutuhan, isu, dan potensi daerah serta hasil evaluasi program tahun sebelumnya.
 2. Perumusan Program dan Kegiatan: Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan analisis situasi, perangkat daerah merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
 3. Penyusunan Rencana Anggaran: Menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan yang telah dirumuskan, sesuai dengan APBD dan kapasitas keuangan daerah.
 4. Verifikasi dan Koordinasi: Melibatkan stakeholder terkait, baik internal perangkat daerah maupun eksternal seperti DPRD dan masyarakat, untuk memastikan rencana yang disusun sudah relevan dan dapat diterima.
 5. Penyusunan Dokumen Renja: Setelah program, kegiatan, dan anggaran disepakati, dokumen Renja disusun dan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk untuk menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD.
- Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Lainnya

- Renja Perangkat Daerah dan RKPD
Renja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya dan mengacu pada RPJMD serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. RKPD sendiri adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang harus diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan RKPD karena Renja merupakan rincian dari program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD.
- Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah
Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran dari perangkat daerah dalam jangka waktu 5 tahun (RPJMD) atau lebih. Renstra ini memberikan arah dan dasar dalam merumuskan Renja. Setiap program dan kegiatan yang disusun dalam Renja harus berpedoman pada strategi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, Renja Perangkat Daerah merupakan implementasi tahunan dari Renstra Perangkat Daerah yang lebih panjang (5 tahun), dengan fokus pada pencapaian sasaran yang terukur.
- Renja Perangkat Daerah dan Renja Kementerian/Lembaga (K/L)
Renja Kementerian/Lembaga (K/L) adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan dan anggaran Kementerian atau Lembaga pemerintah di tingkat pusat. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan Renja K/L adalah dalam hal sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, dalam implementasi program pembangunan yang bersifat nasional, seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan SDM, program yang direncanakan di tingkat K/L harus terintegrasi dengan program yang ada di tingkat Perangkat Daerah, agar pembangunan berjalan selaras antara pusat dan daerah.
- Renja Perangkat Daerah dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota
Renja Provinsi atau Renja Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dan

biasanya merupakan hasil dari penggabungan berbagai Renja dari perangkat daerah yang ada di wilayah tersebut. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota adalah bahwa Renja Perangkat Daerah menjadi bagian dari Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan demikian, program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD harus selaras dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Renja provinsi/kabupaten/kota, yang mencerminkan keputusan politik dan kebijakan pembangunan daerah.

➤ **Tindak Lanjut Proses Penyusunan Renja dalam Penyusunan RAPBD**

Setelah Renja Perangkat Daerah disusun, tahap berikutnya adalah penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Proses ini berfungsi untuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendanai program-program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah.

- Sinkronisasi dengan RKPD: Program-program yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah akan disinkronkan dengan anggaran yang tersedia di RAPBD. Renja menjadi acuan utama dalam menyusun RAPBD, karena anggaran untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja akan dialokasikan dalam RAPBD.
- Penyusunan RAPBD: Berdasarkan Renja, pemerintah daerah akan menyusun RAPBD yang memuat rincian anggaran untuk setiap program dan kegiatan. RAPBD ini kemudian akan dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah.
- Pengawasan dan Evaluasi: Setelah RAPBD disetujui dan ditetapkan menjadi APBD, pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam Renja akan dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan keberhasilan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan langkah penting dalam perencanaan tahunan pemerintahan daerah, yang harus berpedoman pada RPJMD, Renstra, serta RKPD. Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan dokumen Renja Kementerian/Lembaga, Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, dan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD. Dengan demikian, proses

penyusunan Renja Perangkat Daerah memastikan bahwa program dan kegiatan

yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan yang lebih besar, serta dibiayai secara efisien melalui anggaran daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026;
16. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024.
17. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Penajam Paser Utara memiliki maksud dan tujuan yang sangat penting dalam

rangka memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan terarah. Berikut adalah penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Renja:

❖ **Maksud Penyusunan Renja**

- **Sebagai Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Menjadi pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan serta program kerja selama satu tahun anggaran. Hal ini memastikan agar semua aktivitas yang dilakukan terorganisir dengan baik, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

- **Mewujudkan Sinergi dengan Kebijakan Pusat dan Daerah**

Menyelaraskan program kerja yang ada di tingkat daerah dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Hal ini bertujuan agar program yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih besar dan terkoordinasi antara pusat dan daerah.

- **Penyusunan Anggaran yang Efisien**

Mengoptimalkan alokasi anggaran daerah sehingga seluruh sumber daya yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai prioritas-program yang paling mendesak.

❖ **Tujuan Penyusunan Renja**

- **Mencapai Tujuan Pembangunan Daerah**

Tujuan utama penyusunan Renja Diskominfo adalah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi daerah, sehingga hasil pembangunan dapat terlihat dengan jelas.

- **Menjadi Alat Pengendali Pelaksanaan Program**

Sebagai alat pengendali pelaksanaan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja ini, Diskominfo dapat memantau dan mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah direncanakan agar dapat mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang muncul.

- **Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi**

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan menyusun Renja yang terperinci, masyarakat dapat

melihat program dan kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah, serta bagaimana anggaran dialokasikan untuk mendukung program-program tersebut.

- **Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya**

Memastikan bahwa sumber daya yang terbatas, baik itu anggaran, tenaga, maupun waktu, dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

- **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik melalui masukan langsung dalam perencanaan, maupun dalam bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program. Ini membantu untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam setiap program yang dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Diskominfo
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB V PENUTUP

3.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

3.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

3.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2023 dan Capaian Renstra Diskominfo.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2025.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu.

Untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 dan Pagu Anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2023 Jumlah anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 22,104,133,890,00 yang terbagi dalam 5 program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat

terrealisasi sebesar Rp. 19.898.791.046,00 atau sebesar 90,02%.

Tahun Anggaran 2024 (tahun berjalan) Jumlah anggaran penetapan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 70.673.024.816,00 yang terbagi dalam 5 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan, Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja outcome sebesar 82,97% termasuk kategori yang tinggi.

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 Kabupaten Penajam Paser Utara

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d Tahun 2024
Kabupaten Penajam Paser Utara

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Permendagri 86 Tahun 2017	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (N-3)/ 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2) / 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun N-1) / 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (N-2) / 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2) / 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun N-1) / 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Index Kepuasan Masyarakat	98 Persen	98 Persen	98 Persen	96	97.95918367	98 Persen	292	73
2	16	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	98 Persen	98 Persen	98 Persen	96	97.95918367	98 Persen	292	73
2	16	1	2.01	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1	0.25
2	16	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Capaian AKIP Perangkat Daerah	A Nilai	B Nilai	B Nilai	B	B	A Nilai	B	B
2	16	1	2.02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	28 Bulan	32 Orang/ Bulan	32	100	34 Orang/ Bulan	94	23.5
2	16	1	2.02	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	12	100	12 Dokumen	36	9
2	16	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	98 Persen	95 Persen	95 Persen	92	96.84210526	98 Persen	285	71.25
2	16	1	2.05	2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	0 Paket	2 Paket	2	100	5 Paket	6	1.5

2	16	1	2.05	9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0	50 Orang	50	12.5
2	16	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	98 Persen	98 Persen	98 Persen	95	96.9:877551	98 Persen	291	72.75
2	16	1	2.06	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Pengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	11	91.6:666667	1 Paket	24	6
2	16	1	2.06	5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	1	100	1 Paket	14	3.5
2	16	1	2.06	6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	2 Dokumen	2 Bulan	2 Dokumen	2	100	2 Dokumen	6	1.5
2	16	1	2.06	9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	12 Bulan	192 Laporan	190	98.9:833333	192 Laporan	394	98.5
2	16	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Perangkat Daerah	98 Persen	98 Persen	98 Persen	95	96.9:877551	98 Persen	291	72.75
2	16	1	2.07	6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1 Paket	1 Paket	3	100	12 Unit	16	4
2	16	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Perangkat Daerah	98 Persen	98 Persen	98 Persen	95	96.9:877551	98 Persen	291	72.75
2	16	1	2.08	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12	100	12 Laporan	36	9
2	16	1	2.08	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	12 Bulan	14 Laporan	14	100	14 Laporan	40	10
2	16	1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Perangkat Daerah	98 Persen	98 Persen	98 Persen	95	96.9:877551	98 %	291	72.75
2	16	1	2.09	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar Pajak dan Perizinannya	10 Unit	5 Unit	5 Unit	5	100	6 Unit	16	4
2	16	1	2.09	6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10 Unit	12 Unit	10	83.3:333333	12 Unit	32	8

2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Kepuasan Layanan Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	98	Persen	98	Persen	98	Persen	95	96.95877551	95	%	288	72
2	16	2	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	100	12	Bulan	36	9
2	16	2	2.01	4	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0	Dokumen	12	Dokumen	1462	Dokumen	1324	90.56087551	1524	Dokumen	2860	715
2	16	2	2.01	21	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	12	Bulan	12	Dokumen	11	91.66666667	12	Dokumen	35	8.75
2	16	2	2.01	17	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dokumen	12	Bulan	12	Dokumen	10	83.33333333	12	Dokumen	34	8.5
2	16	2	2.01	24	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	50	Orang	12	Orang	50	Orang	45	90	92	Orang	149	37.25
2	16	2	2.01	13	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8	Unit	5	Unit	5	Unit	5	100	8	Unit	18	4.5
2	16	2	2.01	15	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdapat di Dinas Kominfo	15	Komunitas		Komunitas		Komunitas	0			Komunitas	0	0
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah pemenuhan layanan teknologi informatika dan komunikasi Persentase Jumlah Pemenuhan Layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	98	Persen	98	Persen	98	Persen	95	96.95877551	95	Persen	288	72
2	16	3	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik	100	Persen	95	Persen	96	Persen	95	98.95833333	95	Persen	285	71.25
2	16	3	2.01	3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6	Unit	2	Unit	4	Unit	3	75	6	Unit	11	2.75

2	16	3	2.01	4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0
2	16	3	2.02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersenggaranya pengelolaan e-Gov di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Utara	100 Persen	95 Persen	96 Persen	95	98.91833333	100 Persen	290	72.5
2	16	3	2.02	4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12	100	1 Dokumen	25	6.25
2	16	3	2.02	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	1	50	1 Dokumen	2	0.5
2	16	3	2.02	7	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	0 Unit	0 Unit	2 Unit	1	50	2 Unit	3	0.75
2	16	3	2.02	9	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1	50	2 Dokumen	5	1.25
2	16	3	2.02	15	Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	0
2	16	3	2.02	18	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau review arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0
2	16	3	2.02	19	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Dikembangkan	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0
2	16	3	2.02	20	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai Masterplan Smart City	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0
2	16	3	2.02	21	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	0 Aplikasi	0 Aplikasi	0	0	0 Aplikasi	0	0

2	16	3	2.02	22	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	Dokumen	0	0	
2	16	3	2.02	23	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	6	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	0	Unit	0	0	
2	16	3	2.02	24	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	6	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0	0	0	Perangkat Daerah	0	0	
2	16	3	2.02	28	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	Dokumen	0	0	
2	16	3	2.02	30	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	35	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0	0	0	Perangkat Daerah	0	0	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemenuhan Data Prioritas	98	Persen	98	Persen	98	Persen	95	96.9	877551	98	Persen	291	72.75
2	20	2	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterseediaan Data Statistik Sektoral Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	100	Persen	95	Persen	96	Persen	95	98.9	833333	100	Persen	290	72.5
2	20	2	2.01	1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik sektoral	5	Dokumen	12	Dokumen	3	Dokumen	2	66.6	666667	1	Dokumen	15	3.75
2	20	2	2.01	2	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	na	Orang	12	Orang	5	Orang	4	30		12	Orang	28	7

2	20	2	2.01	3	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	20	Dokumen	12	Dokumen	1	Dokumen	1	100	3	Dokumen	16	4
2	20	2	2.01	6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	na	Dokumen	12	Dokumen	2	Dokumen	1	50	2	Dokumen	15	3,75
2	20	2	2.01	7	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	4	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	0	Orang	0	0
2	20	2	2.01	8	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	98	Persentase	0	Persentase	0	Persentase	0	0	0	Persentase	0	0
2	20	2	2.01	9	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	98	Persentase	0	Persentase	0	Persentase	0	0	0	Persentase	0	0
2	20	2	2.01	10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	Dokumen	0	0
2	20	2	2.01	11	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembinas Data Statistik	12	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	Dokumen	0	0
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah kabupaten yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	96	Persen	95	Persen	95	Persen	95	100	95	Persen	285	71.25
2	21	2	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Paser Utara	35	OPD	35	OPD	35	OPD	34	97.14285714	35	OPD	104	26
2	21	2	2.01	1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	100	1	Dokumen	3	0.75
2	21	2	2.01	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	100	1	Laporan	3	0.75

2	21	2	2.01	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	100	2	Laporan	6	1.5
2	21	2	2.01	4	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	35	Perangkat Daerah	36	Perangkat Daerah	35	Perangkat Daerah	35	100	35	Perangkat Daerah	106	26.5
2	21	2	2.02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenahinya Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	35	OPD	35	OPD	35	OPD	35	100	35	OPD	105	26.25
2	21	2	2.02	1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	35	Perangkat Daerah	30	Perangkat Daerah	35	Perangkat Daerah	35	100	35	Perangkat Daerah	100	25

Evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- Tujuan yang dikehendaki;
- Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Bagan dibawah dapat diambil Sebagian dikira mendukung dan bagian factor hambatan

Faktor capaian program/kegiatan tidak sesuai target	Faktor capaian program/kegiatan sesuai target	Faktor capaian program/kegiatan melebihi target	Solusi yang dilakukan
Sarana dan prasarana yang kurang memadai	Aktivitas pemberitaan kegiatan Pemkab dibagi media yang telah bermitra dengan diskominfo	-	Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dalam kelangsungan pelaksanaan kegiatan
kecepatan kelengkapan administrasi oleh mitra kerja	Menggandeng Pihak ketiga sebagai penyedia database nasional berbagai media	-	memberikan tenggat waktu untuk terlaksananya proses administrasi secara tepat waktu
Ada beberapa item pekerjaan yang tidak terlaksana dikarenakan Timeline yang tidak cukup	Mapping pekerjaan yang terencana dengan jelas	-	Memperbaiki timeline pekerjaan
Feedback yang lemah dari OPD saat dilakukan koordinasi	Pembagian kerja yang merata dan kerjasama Tim yang baik	-	Peningkatan koordinasi antar Pimpinan Perangkat Daerah
Standar harga banyak tidak dapat tersedia dalam waktu cepat pada saat akan melakukan perubahan	Pelaksanaan Subkegiatan yang sesuai dengan target	-	memperbaiki mekanisme pengajuan standar harga yang dibutuhkan
Belum memadainya infrastruktur TIK	Tersedianya Forum Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara	-	menyediakan infrastruktur TIK yang memadai
Minimnya tenaga IT dan Statistisi	Terbentuknya Penyelenggara Satu Data Kabupaten Penajam Paser Utara	-	mengikuti pelatihan IT serta penyediaan kebutuhan tenaga IT maupun di bidang

Kurangnya tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang keamanan informasi menjadi kendala signifikan dalam penerapan kebijakan.	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan dan regulasi seperti Perpres, Peraturan BSSN dan lainnya.	-	terkait lainnya
--	--	---	-----------------

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Perubahan indikator kinerja dan target capaian program renstra yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada
2. Pekerjaan akan terlaksana sesuai timeline
3. OPD memberikan feedback sesuai yang diminta

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut sebagai berikut:

1. Memperbaiki timeline pekerjaan serta mempersiapkan kebutuhan administrasi mulai dari mempersiapkan dokumen anggaran sampai pada proses pencairan

Peningkatan koordinasi antar Pimpinan Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
Renstra 2024-2026												
1	Meningkatnya Jumlah OPD yang menerapkan Tatakelola keamanan informasi		v	29 OPD	34 OPD	34 OPD		33 OPD	33 OPD	33 OPD	35 OPD	
2	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi		v	58 Aplikasi	68 Aplikasi	68 Aplikasi		48 Aplikasi	48 Aplikasi	48 Aplikasi	50 Aplikasi	
3	Jumlah ketersediaan SDM aparatur yang kompeten bidang Teknologi Informasi Komunikasi, Persandian dan Statistik		v	30 Orang	40 Orang	50 Orang		25 Orang	25 Orang	25 Orang	35 Orang	

4	Jumlah pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media masa, media baru, media tradisional, media interpersonal, media luar ruang		v	12 Media	13 Media	15 Media		30 Media	30 Media	70 Media	92 Media	
5	Ketersediaan data dan informasi sektoral daerah		v	8 Buku	8 Buku	8 Buku		1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	
6	Jumlah ketersediaan Data Center		v	2 Data Center	3 Data Center	4 Data Center		0 Data Center	0 Data Center	1 Data Center	2 Data Center	
7	Jumlah UMKM Go On- Line Jumlah Petani dan Nelayan Go On-Line		v	30 UMKM	40 UMKM	50 UMKM		30 UMKM	30 UMKM	0 UMKM	40 UMKM	
8	Prosentase Pelaksanaan dan penerapan E-Gov pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah		v	45 Persen	65 Persen	85 Persen		75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	
9	Frekuensi sosialisasi keamanan informasi dan persandian		v	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	0 Kegiatan	8 Kegiatan	10 Kegiatan	
10	Nilai SAKIP Diskominfo						B Nilai				B Nilai	
11	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Diskominfo		v				70%				70%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik.

Karakteristik dan kebutuhan daerah dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat. Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten hingga ke tingkat akar rumput;
2. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;
3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di

tingkat Pemerintah Kabupaten maupun di tingkat Pemerintah Provinsi;

4. Pengelolaan e-Government Kabupaten Penajam Paser Utara dimana keselarasan perencanaan pengembangan e- Government antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi memiliki arti penting;
5. Penyelarasan data Statistik Sektoral;
6. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, diantaranya adalah :

1. Kekuatan

- 1) Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal;
- 2) Adanya perangkat Peraturan Perundangan yang mendukung Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
 - d) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - e) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara nomor: 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Kelemahan

- 1) Kualitas serta kuantitas SDM yang tersedia belum memenuhi standard kompetensi yang dipersyaratkan;
- 2) Data dan informasi belum tersedia secara komprehensif;
- 3) Belum optimalnya tugas dan fungsi jabatan fungsional;
- 4) Belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknologi informasi yang ada oleh masyarakat;
- 5) Sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai;
- 6) Belum tersedianya data tentang indeks kepuasan masyarakat akan informasi pembangunan daerah;
- 7) Belum tersedianya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai dalam pengembangan data center;
- 8) Kurangnya pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika terhadap aparatur pemerintah;
- 9) Kurang kesadaran dari aparatur terhadap arti penting data dan informasi khususnya dalam pengamanan informasi.

3. Peluang

- 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap layanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
- 2) Kebutuhan dasar di bidang infrastruktur komunikasi maupun informatika dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat pengguna dan pemakai jasa komunikasi dan informatika;
- 3) Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- 4) Masyarakat yang haus akan informasi;
- 5) Setiap PD memiliki Sistem Informasi yang dibutuhkan untuk pelayanan publik;
- 6) Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 274 yang berbunyi Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan

Daerah;

- 7) Peningkatan perkembangan Teknologi Informasi baik dari sisi hardware maupun software dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas aplikasi sistem informasi serta layanan akses internet di masyarakat;
- 8) Semakin meningkatnya kualitas SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang IT;
- 9) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi publik.

4. Ancaman

- 1) Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai guna mendukung kinerja PD;
- 2) Masyarakat semakin kritis terhadap proses dan hasil pembangunan yang telah dilakukan sebagai bagian dari keterbukaan informasi;
- 3) Penyediaan akses internet yang semakin mudah dan biaya terjangkau;
- 4) Maraknya konten digital negatif yang kurang mendidik, sesat dan merusak moral dan tatanan sosial masyarakat;
- 5) Inkonsistensi penempatan aparatur dengan kompetensi yang dimiliki;
- 6) Masih rendahnya ketersediaan SDM yang handal dan profesional khususnya menguasai bidang IT (analisis, aplikasi, database, pemrograman dan jaringan).

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat daerah telah dilakukan, namun koordinasi dan kerjasama antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi masih perlu ditingkatkan agar dapat pelaksanaan kegiatan berjalan pada satu rel yang sama. Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi mempengaruhi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara dalam proses mencapai target program/kegiatan, antara lain :

1. Kurangnya infrastruktur TI serta SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan SPBE;
2. Belum optimalnya fungsi KIM yang telah dibentuk;
3. Masih lemahnya signal komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan Program Satu Data;
5. Belum optimalnya pencapaian Indeks SPBE sesuai standar nasional;
6. Belum optimalnya penyelenggaraan SP4N Lapor, Call Center PPU Siaga 112 serta Keterbukaan Informasi Publik melalui PPID;
7. Belum optimalnya penyelenggaraan Kota Cerdas (Smart City);
8. Belum optimalnya pengelolaan website Perangkat Daerah yang menggunakan domain Pemerintah Kabupaten;
9. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan;
10. Belum tersedianya gedung dan perlengkapan kantor yang memadai dalam pengembangan data center;
11. Masih terbatasnya pemahaman ASN terhadap keamanan data dan informasi;
12. Belum maksimalnya penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah;
13. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang standar kelayakan pengadaan TI baik software maupun hardware;
14. Terbatasnya alokasi anggaran yang memadai pada setiap PD untuk mendukung urusan komunikasi dan informatika;

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu Man (Manusia), Money (Dana), Machine (Sarpras), Methode (Tupoksi dan Tata Laksana), dan Matrial (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika.

TABEL 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat undefined	98 %	10,799,493,061	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat undefined	98%	12,644,893,135	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		IKM Perangkat Daerah	98 %	49,030,600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		IKM Perangkat Daerah	98 %	50,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	45,030,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai Capaian AKIP Perangkat Daerah	A Nilai	7,061,605,114	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai Capaian AKIP Perangkat Daerah	A Nilai	7,061,605,114	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	6,835,995,114	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	6,839,995,114	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	221,610,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	221,610,000	

		Semua Kel/Desa									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IKM Perangkat Daerah	98 %	784,884,850	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IKM Perangkat Daerah	98 %	1,177,327,275	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	99,848,850	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	149,773,275	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	685,036,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	1,027,554,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	1,679,807,022	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	2,519,710,533	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55,548,860	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	80,323,290	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,877,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4,316,250	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2,760,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4,140,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Penajam Paser Utara, Semua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	300 Laporan	1,620,620,662	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	2,430,930,993	

		Kecamatan, Semua Kel/Desa	dan Konsultasi SKPD				Semua Kel/Desa				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Perangkat Daerah	98 %	554,845,875	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		IKM Perangkat Daerah	98 %	832,268,813	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	554,845,875	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	832,268,813	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Perangkat Daerah	98 %	488,709,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Perangkat Daerah	98 %	733,064,400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16,309,600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15,464,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	478,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	717,600,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Perangkat Daerah	98 %	180,610,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		IKM Perangkat Daerah	98 %	270,915,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	92,370,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	138,555,000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	88,240,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	132,360,000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Indeks Kepuasan Layanan Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100 % 96 %	30,353,393,643	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Indeks Kepuasan Layanan Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100 % 96 %	53,302,358,366	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	30,353,393,643	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	53,302,358,366	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	15 Komunitas	216,461,420	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	15 Komunitas	267,064,694	
	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2 Permohonan	1,063,419,950	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	200 Permohonan	1,378,988,100	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	28,748,513,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	92 Media	51,168,806,663	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	50 Orang	324,999,273	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	50 Orang	487,498,910	

3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase jumlah pemenuhan layanan teknologi informatika dan komunikasi Persentase Jumlah Pemenuhan Layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	96 % 96 %	4,923,054,430	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase jumlah pemenuhan layanan teknologi informatika dan komunikasi Persentase Jumlah Pemenuhan Layanan Teknologi Informatika dan Komunikasi	96 % 96 %	7,384,581,645	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik	100 %	137,421,510	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik	100 %	206,132,265	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	137,421,510	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	34 Dokumen	206,132,265	
	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersenggaranya Pengelolaan E-Gov di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	100 %	4,785,632,920	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersenggaranya Pengelolaan E-Gov di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	100 %	7,178,449,380	
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	442,488,200	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Laporan	663,732,300	
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	236,992,000	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	355,488,000	

	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	5 Dokumen	211,818,000	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	5 Dokumen	317,727,000	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi	391,772,000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	589,158,000	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	85,518,000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	128,277,000	
	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	5 Dokumen	175,389,000	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	5 Dokumen	263,083,500	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	6 unit	217,812,000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	6 unit	326,718,000	

	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	6 Perangkat Daerah	163,881,200	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	7 Perangkat Daerah	245,821,800	
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen koordinasi fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	58,872,200	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen koordinasi fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	88,308,300	
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	35 Perangkat Daerah	2,800,090,320	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	35 Perangkat Daerah	4,200,135,480	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Pemenuhan Data Prioritas	98 %	549,978,695	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Pemenuhan Data Prioritas	98 %	824,968,043	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan data statistik sektoral sesuai prinsip satu data Indonesia	100 %	549,978,695	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan data statistik sektoral sesuai prinsip satu data Indonesia	100 %	824,968,043	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	4 Orang	101,101,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	4 Orang	151,651,500	
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau	98 Persentase	84,873,000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	98 Persentase	127,309,500	

			Penyusunan Kebijakan								
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	98 Persentase	102,456,200	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	98 Persentase	153,684,300	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12 Dokumen	119,431,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	12 Dokumen	179,146,500	
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	12 Dokumen	142,117,495	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	12 Dokumen	213,176,243	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang telah menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	96 %	995,907,174	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang telah menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	96 %	1,493,860,761	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	34 OPD	789,263,700	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	34 OPD	1,183,895,550	

	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	358,000,000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	537,000,000	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	120,936,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	181,404,000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	185,349,700	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	278,024,550	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	34 OPD	206,643,474	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	34 OPD	309,965,211	
	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	34 Perangkat Daerah	206,643,474	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	34 Perangkat Daerah	309,965,211	
					47,621,827,003					75,650,659,949	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renja Dinas Kominfo Tahun 2024 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunandari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada visi Pembangunan Nasional 2020-2024 yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Arah Kebijakan Badan Pusat Statistik :

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat;
3. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik.

Arah Kebijakan Badan Siber dan Sandi Nasional :

1. Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian;
2. Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024, yaitu :

1. Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan pelayanan prima kepada publik.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan dalam mencapai tujuan tersebut diatas untuk tahun 2024, yaitu :

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang unggul;
2. Pemantapan sarana dan prasarana pemerintahan dengan dukungan teknologi informasi.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan rencana pembangunan daerah, sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifikasi, terinci, terukur

dan dapat dicapai.

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Penajam Paser Utara dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program/kegiatan pada tahun 2024 berfokus pada :

1. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
3. Meningkatkan Program Satu Data Indonesia;
4. Meningkatkan Sistem Keamanan Informasi;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
6. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
1	Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien		Rata-Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	B
2	Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85,55
		Pemantapan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Dengan Dukungan Teknologi Informasi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Diskominfo	%	75

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajm Pase Utara dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam pada tahun 2025 disusun sebanyak 5 program, 13 kegiatan, 39 sub kegiatan, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara

Kode						Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2		3	4	5	6	7	8	9	10
15	00					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN									
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM	DISKOMIN FO Kab. PPU	98%	12,644,891,135	APBD		98%	14,276,548,477
2	16	01	2	05		1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	DISKOMIN FO Kab. PPU	Nilai B	50,000,000	APBD		Nilai B	60,000,000
2	16	01	2	05	02	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISKOMIN FO Kab. PPU	2 Dokumen	50,000,000	APBD		2 Paket	60,000,000
2	16	01	2	02		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	DISKOMIN FO Kab. PPU	Nilai B	7,061,605,114	APBD		Nilai B	7,061,605,114
2	16	01	2	02	01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	DISKOMIN FO Kab. PPU	42 Orang/bulan	6,839,995,114	APBD		40 Orang/bulan	6,839,995,114
2	16	01	2	02	03	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISKOMIN FO Kab. PPU	12 Dokumen	221,610,000	APBD		12 Dokumen	221,610,000
2	16	01	2	05		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	DISKOMIN FO Kab. PPU	Nilai B	1,177,327,275	APBD		Nilai B	1,778,327,275
2	16	01	2	05	02	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	DISKOMIN FO Kab. PPU	4 Paket	149,773,275	APBD		5 Paket	250,773,275
						2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DISKOMIN FO Kab. PPU	60 Orang	1,027,554,000	APBD		60 Orang	1,527,554,000

2	16	01	2	06		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	DISKOMIN FO Kab. PPU	Nilai B	2,519,710,533	APBD		Nilai B	2,641,710,533
2	16	01	2	06	02	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DISKOMIN FO Kab. PPU	2 Paket	80,323,290	APBD		4 Faket	200,323,290
2	16	01	2	06	05	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DISKOMIN FO Kab. PPU	3 Paket	4,316,250	APBD		3 Faket	5,316,250
2	16	01	2	06	06	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DISKOMIN FO Kab. PPU	4 Dokumen	4,140,000	APBD		4 Dokumen	5,140,000
2	16	01	2	06	09	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISKOMIN FO Kab. PPU, Dalam Provinsi & Luar Provinsi	450 Laporan	2,430,930,993	APBD		450 Laporan	2,430,930,993
2	16	01	2	07		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	DISKOMIN FO Kab. PPU	Nilai B	832,268,813	APBD		Nilai B	1,500,000,000
2	16	01	2	07	06	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DISKOMIN FO Kab. PPU	22 Unit	832,268,813	APBD		22 Unit	1,500,000,000
2	16	01	2	08		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	DISKOMIN FO Kab. PPU	Nilai B	733,064,400	APBD		Nilai B	926,350,000
2	16	01	2	08	01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISKOMIN FO Kab. PPU	12 Laporan	15,464,400	APBD		12 Laporan	26,350,000
2	16	01	2	08	03	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DISKOMIN FO Kab. PPU	24 Laporan	717,600,000	APBD		26 Laporan	900,000,000
2	16	01	2	09		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Diskominfo	DISKOMIN FO Kab. PPU	Nilai B	270,915,000	APBD		Nilai B	308,555,555
2	16	01	2	09	02	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DISKOMIN FO Kab. PPU	10 Unit	138,555,000	APBD		15 Unit	158,555,555

2	16	01	2	09	06	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DISKOMIN FO Kab. PPU	50 Unit	132,360,000	APBD	50 Unit	150,000,000
2	16	02				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	DISKOMIN FO Kab. PPU	96%	53,302,358,367	APBD	96%	63,702,358,367
								Indeks Kepuasan Layanan	DISKOMIN FO Kab. PPU	100 Nilai		APBD	100 Nilai	
2	16	02	2	01		1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik	DISKOMIN FO Kab. PPU	12 bulan	53,302,358,367	APBD	12 bulan	63,702,358,367
2	16	02	2	01	05	2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	DISKOMIN FO Kab. PPU	92 Media	51,168,806,663	APBD	100 Media	61,168,806,663
2	16	02	2	01	06	3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	DISKOMIN FO Kab. PPU	200 Permohonan	1,378,988,100	APBD	100 Permohonan	1,578,988,100
2	16	02	2	01	08	5	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Publik	DISKOMIN FO Kab. PPU	15 Komunitas	267,064,694	APBD	20 Komunitas	367,064,694
2	16	02	2	01	10	6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	DISKOMIN FO Kab. PPU	50 Orang	487,498,910	APBD	50 Orang	587,498,910
2	16	03				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Jumlah Pemenuhan Layanan Teknologi dan Informatika	DISKOMIN FO Kab. PPU	96%	7,384,581,645	APBD	96%	306,132,265
2	16	03	2	01		1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Domain serta Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	DISKOMIN FO Kab. PPU	100%	206,132,265	APBD	100%	306,132,265
2	16	03	2	01	03	2	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	DISKOMIN FO Kab. PPU	34 Dokumen	206,132,265	APBD	35 Dokumen	306,132,265
2	16	03	2	02		2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersenggaranya Pengelolaan E-Gov di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara			7,178,449,380	APBD		-

2	16	03	2	02	04	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	DISKOMIN FO Kab. PPU	Dokumen		APBD		Dokumen	
2	16	03	2	02	07	2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	DISKOMIN FO Kab. PPU	Unit		APBD		Unit	
2	16	03	2	02	04	3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	DISKOMIN FO Kab. PPU	12 Dokumen		APBD		12 Dokumen	
2	16	03	2	02	05	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	DISKOMIN FO Kab. PPU	Dokumen		APBD		Dokumen	
2	16	03	2	02	07	5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	DISKOMIN FO Kab. PPU	Unit		APBD		Unit	
2	16	03	2	02	09	7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	DISKOMIN FO Kab. PPU	Dokumen		APBD		Dokumen	
2	16	03	2	02	11	9	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	DISKOMIN FO Kab. PPU	Dokumen		APBD		Dokumen	
2	16	03	2	02	04	1	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	DISKOMIN FO Kab. PPU	2 Laporan	663,732,300	APBD		3 laporan	763,732,300
2	16	03	2	02	07	2	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	DISKOMIN FO Kab. PPU	2 Dokumen	355,488,000	APBD		3 Dokumen	455,488,000
2	16	03	2	02	04	3	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	DISKOMIN FO Kab. PPU	5 Dokumen	317,727,000	APBD		5 Dokumen	417,727,000

2	16	03	2	02	05	4	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	DISKOMIN FO Kab. PPU	3 Aplikasi	589,158,000	APBD		3 Aplikasi	689,158,000
2	16	03	2	02	07	5	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	DISKOMIN FO Kab. PPU	3 Aplikasi	128,277,000	APBD		3 Aplikasi	228,277,000
2	16	03	2	02	08	6	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	DISKOMIN FO Kab. PPU	5 Dokumen	263,083,500	APBD		5 Dokumen	363,083,500
2	16	03	2	02	09	7	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	DISKOMIN FO Kab. PPU	6 unit	326,718,000	APBD		6 unit	426,718,000
2	16	03	2	02	11	9	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	DISKOMIN FO Kab. PPU	7 Perangkat Daerah	245,821,800	APBD		7 Perangkat Daerah	345,821,800
2	16	03	2	02	09	7	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	DISKOMIN FO Kab. PPU	2 Dokumen	88,308,300	APBD		2 Dokumen	100,308,300
2	16	03	2	02	11	9	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	DISKOMIN FO Kab. PPU	35 Perangkat Daerah	4,200,135,480	APBD		35 Perangkat Daerah	4,500,135,480
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemenuhan Data Prioritas		98%	824,968,043	APBD		98%	-	

2	20	02	2	01		1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia		90%	824,968,043	APBD		95 Persen	-
2	20	02	2	01	01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	DISKOMIN FO Kab. PPU	5 Dokumen		APBD		5 Dokumen	
2	20	02	2	01	02	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	DISKOMIN FO Kab. PPU	5 Orang		APBD		5 Orang	
2	20	02	2	01	03	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	DISKOMIN FO Kab. PPU	20 Dokumen		APBD		20 Dokumen	
2	20	02	2	01	04	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	DISKOMIN FO Kab. PPU	Orang		APBD		Orang	
2	20	02	2	01	05	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	DISKOMIN FO Kab. PPU	1 Unit		APBD		1 Unit	
2	20	02	2	01	06	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	DISKOMIN FO Kab. PPU	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	
2	20	02	2	01	01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	DISKOMIN FO Kab. PPU	4 Orang	151,651,500	APBD		4 Orang	251,651,500
2	20	02	2	01	02	2	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	DISKOMIN FO Kab. PPU	98 Persentase	127,309,500	APBD		98 Persentase	227,309,500
2	20	02	2	01	03	3	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	DISKOMIN FO Kab. PPU	98 Persentase	153,684,300	APBD		98 Persentase	253,684,300
2	20	02	2	01	04	4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	DISKOMIN FO Kab. PPU	12 Dokumen	179,146,500	APBD		12 Dokumen	279,146,500

2	20	02	2	01	05	5	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	DISKOMIN FO Kab. PPU	12 Dokumen	213,176,243	APBD		12 Dokumen	313,176,243
2	21						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	21	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah Kabupaten yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	DISKOMIN FO Kab. PPU	95 Persen	1,493,860,761	APBD		96 Persen	1,993,860,761
2	21	02	2	01		1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	DISKOMIN FO Kab. PPU	34 Perangkat Daerah	1,183,895,550	APBD		34 Perangkat Daerah	1,583,895,550
2	21	02	2	01	01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	DISKOMIN FO Kab. PPU	4 Dokumen	187,467,000	APBD		4 Dokumen	287,467,000
2	21	02	2	01	02	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DISKOMIN FO Kab. PPU	4 Laporan	537,000,000	APBD		4 Laporan	637,000,000
2	21	02	2	01	03	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	DISKOMIN FO Kab. PPU	4 Laporan	181,404,000	APBD		4 Laporan	281,404,000
2	21	02	2	01	04	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	DISKOMIN FO Kab. PPU	34 Perangkat Daerah	278,024,550	APBD		34 Perangkat Daerah	378,024,550
2	21	02	2	02		2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten	DISKOMIN FO Kab. PPU	34 Perangkat Daerah	309,965,211			34 Perangkat Daerah	409,965,211

2	21	02	2	02	01	1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	DISKOMIN FO Kab. PPU	34 Perangkat Daerah	309,965,211	APBD		34 Perangkat Daerah	409,965,211
Jumlah Total Anggaran											75,650,659,951				80,278,899,870

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2025.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu :

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**
 - a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - i. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ii. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - iii. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - iv. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - v. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - vi. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**

Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- vii. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - i. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - ✓ Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - ✓ Pelayanan Informasi Publik
 - ✓ Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - i. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa
 - ii. Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
 - ✓ Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - ✓ Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
 - ✓ Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
 - ✓ Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Daerah

- ✓ Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- ✓ Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
- ✓ Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
- ✓ Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
- ✓ Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- ✓ Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- i. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
 - ✓ Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
 - ✓ Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
 - ✓ Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- i. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

- ✓ Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- ii. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan yang ada terkait dengan perencanaan pembangunan daerah agar dapat tercapainya tujuan pembangunan daerah yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026.

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2024 ini adalah :

1. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026.
2. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan serta keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang dalam RPJMD-Renstra Perangkat Daerah dan Renja Tahunan, maka ditetapkanlah kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh Pejabat dan staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik- baiknya

sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi Renstra, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

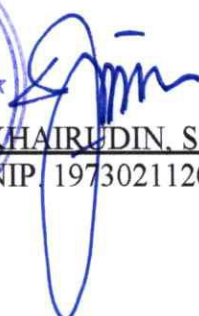
Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Renja 2025 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Penajam, Juli 2024

KEPALA DINAS,




KHAIRUDIN, S.S., M.M.
NIP. 197302112009121004